

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya Indonesia dalam implementasi kebijakan iklim internasional selama kurang lebih satu dekade terakhir dilakukan dengan pendekatan *voluntary*. Implementasi yang bersifat *voluntary* ini menunjukkan bahwa Indonesia ikut aktif dalam partisipasi mitigasi perubahan iklim global secara sukarela terkait menerapkan dan mematuhi kebijakan atau perjanjian lingkungan internasional.¹ Salah satu contoh implementasi kebijakan iklim Indonesia yang dilakukan dengan pendekatan *voluntary* atau sukarela adalah kesepakatan pengurangan emisi karbon dunia dengan bank dunia, di mana Indonesia bisa mengurangi 22 juta ton emisi karbon di provinsi Kalimantan Timur. Kesepakatan ini memiliki tujuan untuk menurunkan degradasi hutan dan deforestasi pada 12,7 hektar lahan yang kaya akan hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati. Di samping itu, Bank Dunia juga menjanjikan pemberian dana kepada Indonesia hingga 110 juta dolar Amerika Serikat apabila kesepakatan tercapai.²

Pada upaya pengurangan emisi karbon dan Gas Rumah Kaca (GRK) dunia, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai konvensi kerangka kerja internasional Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) terkait

¹Nurjannah Septyanun et al., "Regulasi Dan Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Voluntary Dan Mandatory Di Nusa Tenggara Barat," *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* 11, no. 2 (2023): 399.

² World Bank Group, "Indonesia Dan Bank Dunia Menandatangani Kesepakatan Pengurangan Emisi Karbon," *World Bank*, Desember 13, 2020, diakses 26 April 2024, <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2020/12/08/indonesia-and-the-world-bank-sign-milestone-agreement-on-emission-reductions>.

penanganan perubahan iklim telah membentuk rezim internasional sebagai pedoman semua pihak maupun aktor dunia internasional yang terlibat didalamnya.³ Rezim internasional tersebut adalah Kyoto Protokol dan Paris Agreement. Protokol Kyoto mulai diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2007 saat Conference of Parties (COP) ke-13 di Bali. Selanjutnya, Protokol Kyoto yang dinilai sudah tidak relevan digantikan oleh Perjanjian Paris atau Paris Agreement yang mulai diratifikasi Indonesia pada tahun 2016.⁴ Terkait perjanjian paris sebagai rezim internasional yang menjadi pedoman penanganan perubahan iklim global ini, Indonesia berkomitmen ikut berpartisipasi dengan menjadikan implementasi kebijakan diwujudkan berdasarkan adaptasi kondisi dan situasi negara.

Dalam Perjanjian Paris terdapat suatu target utama yang menjadi tujuan semua negara dan pihak yang meratifikasi perjanjian internasional terkait perubahan iklim ini, yaitu *Net Zero Emission* (NZE) global target.⁵ Tujuan utama dari target NZE ini adalah untuk mencapai stabilitas emisi global yang dinilai aman untuk keberlanjutan kehidupan di bumi. Tingkat emisi karbon dunia yang disepakati untuk dicapai oleh para pihak yang memegang komitmen perjanjian paris adalah dibawah 2°C tingkat praindustri, dengan minimum 1,5°C kenaikan suhu global pada tahun 2050 menjadi target ideal.⁶ Dalam upaya mencapai target NZE diatas, para pihak yang meratifikasi Perjanjian Paris diberikan kewajiban kontribusi secara

³ Aldy Nofansya et.al, "Implementasi Perjanjian Paris dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia." *Padjajaran Journal of Internasional Relations* (PADJIR) 5, No.1 (Januari, 2023), 76.

⁴ Aldy Nofansya et.al, "Implementasi Perjanjian Paris dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia." *Padjajaran Journal of Internasional Relations* (PADJIR) 5, No.1 (Januari, 2023), 77.

⁵ Aulia Sabila Qalbie and Rahmaniah Rahmaniah, "The Opportunity to Achieve Net Zero Emissions in Indonesia through the Implementation of a Green Economy to Address Climate Change," *Global South Review* 5, no. 1 (September 15, 2023): 80.

⁶ Aulia Sabila Qalbie and Rahmaniah Rahmaniah, "The Opportunity to Achieve Net Zero Emissions in Indonesia through the Implementation of a Green Economy to Address Climate Change," *Global South Review* 5, no. 1 (September 15, 2023): 81.

berkala terhadap upaya penanganan perubahan iklim dengan fokus penurunan emisi GRK yang disebut Nationally Determined Contribution (NDC).⁷ Indonesia sebagai pihak yang menetapkan komitmen terhadap NZE juga telah menetapkan NDC mulai tahun 2021.

Pada awal penetapan NDC, target penurunan emisi karbon di tahun 2030 Indonesia ditetapkan 29% tanpa syarat dan 41% dengan bantuan internasional. Selanjutnya, pada tanggal 23 September 2022, Indonesia memperbaharui target penurunan emisi menjadi 31% tanpa syarat dan 43% dengan bantuan internasional.⁸ Terkait upaya mencapai NDC yang ditetapkan, Indonesia memfokuskan kebijakan penurunan emisi karbon kepada lima sektor, yaitu sektor energi, limbah, proses industri dan penggunaan pupuk, pertanian, dan kehutanan.⁹

Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau *carbon pricing* merupakan salah satu kebijakan Indonesia dalam upaya memenuhi NDC sebagai wujud komitmen kepada target NZE global.¹⁰ Dengan target NZE yang ingin mencapai netralitas karbon secara global, menjadikan kebijakan NEK Indonesia sebagai implementasi upaya untuk mengurangi emisi dan dampak perubahan iklim pada negara sekitar, regional maupun global.¹¹ Kebijakan NEK ditetapkan dengan

⁷ Aulia Sabila Qalbie and Rahmaniah Rahmaniah, "The Opportunity to Achieve Net Zero Emissions in Indonesia through the Implementation of a Green Economy to Address Climate Change," *Global South Review* 5, no. 1 (September 15, 2023): 81.

⁸ Egi Suarga et al., "Meninjau Keadaan Ekonomi Hijau Indonesia: Bagaimana Seharusnya Strategi Kita Melangkah Ke Depan?" *WRI Indonesia*, diakses 21 Mei 2024, <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/meninjau-keadaan-ekonomi-hijau-indonesia-bagaimana-seharusnya-strategi-kita-melangkah-ke-0>.

⁹ Adnan Rizvi, "Pakistan Economic Brief 2020," *KPMG*, diakses 24 Mei, 2024, <https://kpmg.com/pk/en/home/insights/2020/06/pkeconomicbrief2020.html>.

¹⁰ Mochammad Al Ikhsan, "Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Dalam Membantu Pendanaan Perubahan Iklim Dan Pengurangan Gas Efek Rumah Kaca," no. Desember (2021): 1–6 diakses 26 April 2024, <https://www.researchgate.net/publication/356842009>.

¹¹ Mochammad Al Ikhsan, "Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Dalam Membantu Pendanaan Perubahan Iklim Dan Pengurangan Gas Efek Rumah Kaca," no. Desember (2021): 1–6 diakses 26 April 2024, <https://www.researchgate.net/publication/356842009>.

berlandaskan kepada Peraturan Presiden (Perpres) no. 98 tahun 2021. NEK merupakan kebijakan kolaborasi kementerian dan lembaga terkait dengan mitigasi perubahan iklim, diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Presiden, dan lembaga terkait lainnya. NEK merupakan kebijakan dengan memberikan nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia dan kegiatan ekonomi.¹² Kebijakan NEK merangkap pada berbagai sektor dalam menjadi upaya mitigasi perubahan iklim, namun dalam penelitian ini, analisis akan lebih mendalam membahas terkait kebijakan NEK dalam ruang lingkup sektor energi di Indonesia.

Saat ini, kebijakan Indonesia sudah mulai direncanakan bertransisi kepada kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Namun pada penerapannya kebijakan energi Indonesia malah berjalan kearah sebaliknya.¹³ Mulai dari kebijakan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) no.3 tahun 2020 atau dikenal UU Minerba, serta UU cipta kerja alias Omnibus Law yang memperbanyak insentif fiskal dan non-fiskal pada aktivitas penambangan batu bara, terkhusus untuk pengembangan produk turunan batu bara seperti dimetil eter (DME) yang dipromosikan sebagai bahan bakar alternatif untuk pengurangan impor subsidi *Liqued Petroleum Gas* (LPG).¹⁴ Dari kebijakan energi diatas, menunjukkan tidak ada perubahan signifikan mengarah kepada pengurangan porsi batu bara dalam bauran bahan bakar Indonesia saat ini.

¹² Ikhsan, “Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Dalam Membantu Pendanaan Perubahan Iklim Dan Pengurangan Gas Efek Rumah Kaca.”

¹³ Anissa Suharsono and Lucky Lontoh, “Risalah Kebijakan Energi Indonesia,” *International Institute for Sustainable Development* (2020): 1–21, IISD.org/gsi.

¹⁴ “Jadi Tumpuan Energi Nasional, Pemerintah Kembangkan Tujuh Skema Hilirisasi Batubara,” *ESDM*, Oktober 15, 2010, diakses Juni 19, 2024, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/jadi-tumpuan-energi-nasional-pemerintah-kembangkan-tujuh-skema-hilirisasi-batubara>.

Pada kebijakan pembangunan Indonesia, 75 Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) energi terbarukan pada tahun 2017-2018 yang telah ditandatangani, 36% belum mencapai kesepakatan, dan hampir 7% telah dibatalkan. Bahkan pada tahun 2018-2020, total hanya 564,89 gigawatt (GW) dari 13 proyek (rata-rata 188,3 megawatt MW) per tahun yang menandatangani PJBL, yang lebih rendah jauh dari rata-rata tahunan sebelumnya berjumlah 500 MW per tahun.¹⁵ Dari kebijakan pembangunan transisi energi terbarukan yang masih berjalan lambat, Indonesia masih perlu meningkatkan upaya dalam transisi energi terbarukan untuk mencapai target NZE global.

Disamping kebijakan Indonesia yang memperlihatkan ketidakselarasan dengan komitmen target NZE yang ingin dicapai, kondisi konsumsi energi Indonesia saat kebijakan NEK diluncurkan juga masih didominasi oleh konsumsi energi fosil.¹⁶ Pada tahun 2021 konsumsi energi Indonesia berjumlah 909,24 juta barel, yang mana terbagi atas: bensin 25,95%, Solar 21,34%, listrik 18,52%, gas alam 9,85%, batu bara 9,66%, lpg 8,02%, biomassa 6,64%, biogas 0,02%. Dari persentase konsumsi energi Indonesia tersebut, lebih dari 90% konsumsi energi Indonesia merupakan energi fosil dan hanya 6,66% energi non-fosil.

Dari kondisi kebijakan energi, pembangunan, dan konsumsi energi Indonesia yang masih terdapat beberapa tidak selaras dengan komitmen Indonesia ingin mencapai target NZE global, kebijakan NEK diluncurkan sebagai upaya lanjutan

¹⁵ Amelia Yesidora, "Aturan Nilai Ekonomi Karbon, Mampukah Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca?," *Katadata.Co.Id*, terakhir diedit 2021, diakses 31 Mei 2024
<https://katadata.co.id/indepth/telaah/618cded6c0b7b/aturan-nilai-ekonomi-karbon-mampukah-turunkan-emisi-gas-rumah-kaca>.

¹⁶ Viva Kusnandar budi, "Sektor Dengan Konsumsi Energi Terbesar Di RI Pada 2021," *Databoks.Katadata.Co.Id*, terakhir diedit 2022, diakses 31 Mei 2024
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/ini-sektor-dengan-konsumsi-energi-terbesar-di-ri-pada-2021>.

baru Indonesia dalam mencapai target NZE global. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melakukan analisis lebih lanjut untuk melihat apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan NEK dalam ruang lingkup sektor energi sebagai upaya Indonesia dalam mencapai target NZE global.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia sebagai pihak yang ikut meratifikasi Perjanjian Paris dalam mitigasi perubahan iklim, menjadikan Indonesia ikut berupaya mencapai target *Net Zero Emission* global yang menjadi tujuan utama Perjanjian Paris. Namun, kebijakan terkait dengan upaya Indonesia dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) saat ini terlihat tidak sejalan dengan komitmen mencapai target NZE. Hal itu terlihat pada kebijakan dan konsumsi energi Indonesia didominasi penggunaan dan konsumsi batu bara sumber energi fosil yang merupakan sumber emisi GRK Indonesia. Pada tahun 2021, Indonesia meluncurkan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai implementasi upaya Indonesia mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) global. Dengan kebijakan nasional Indonesia terkait penurunan emisi disektor energi dinilai masih tidak relevan dengan target ambisius NZE yang ingin dicapai, menjadikan perlu adanya analisis lebih lanjut terkait pembentukan kebijakan NEK. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan NEK di sektor energi Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya, pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Apa saja faktor yang

mempengaruhi pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Indonesia disektor energi dalam upaya mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) global?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Indonesia di sektor energi dalam upaya mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) global.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penulis ingin penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur akademik di ruang lingkup hubungan internasional dan politik, terkhusus pada kajian terkait kebijakan iklim dan energi. Dengan penelitian ini peneliti ingin memberikan perspektif baru terkait bagaimana pengaruh ide dan nilai dalam pembentukan kebijakan luar negeri, sekaligus bagaimana negara merespon tantangan global, yang mana di penelitian ini adalah perubahan iklim. Hasil dari penelitian ini peneliti harap dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi lain dalam pengembangan kajian lebih lanjut terhadap kebijakan iklim dan energi di negara berkembang dengan berpedoman kepada Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Peneliti ingin penelitian ini memberikan tambahan wawasan kapda para pembuat kebijakan, pelaku industry, dan pemangku kepentingan yang terkait dalam mitigasi perubahan iklim, terkhusus dalam memahami dinamika pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon Indonesia di sector energi. Dengan penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan Nilai

Ekonomi Karbon Indonesia di sektor energi ini, akan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efisien kedepannya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus mencapai target Nationally Determined Contribution Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat berguna untuk dijadikan sebagai dasar pengembangan kerangka kerja regulasi yang lebih komprehensif dan mendukung transisi energi nasional.

1.6 Studi Pustaka

Dalam mengembangkan serta mengevaluasi penelitian ini, peneliti merujuk pada literatur dan penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dan memiliki kapabilitas sebagai dasar studi kepustakaan untuk penelitian ini. Beberapa referensi tersebut antara lain:

Tulisan pertama yang menjadi literatur bacaan bagi peneliti dalam proses analisis penelitian ini adalah tulisan dari Arief Rahman, Paul Dargusch, dan David Wadley AR berjudul *The political economy of oil supply in Indonesia and the implications for renewable energy development*.¹⁷ Dalam artikel ini penulis menjelaskan terkait bagaimana kebijakan digunakan dalam mengelola sumber daya. Negara yang menjadi objek penelitian pada artikel ini adalah Indonesia. Penulis dalam artikel ini menggunakan pendekatan ekonomi politik yang kemudian membahas bagaimana Indonesia dalam sektor energi saat ini mengelola sumber daya yang tersedia. Dengan Menjabarkan situasi dan penilaian terhadap pengelolaan sumber daya alam untuk sektor energi, terkhusus perminyakan. Dalam

¹⁷ Arief Rahman, Paul Dargusch, and David Wadley, "The Political Economy of Oil Supply in Indonesia and the Implications for Renewable Energy Development," *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 144, no. April (2021): 111027, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111027>.

artikel ini juga menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan atau *decision-making* terhadap pengelolaan sumber daya sektor energi dengan menganalisis peran institusi, kelompok kepentingan dan ideologi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pada aspek teknis implementasi melalui instrument kebijakan.

Artikel ini menjadi pembanding bagi peneliti dalam bagaimana melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan iklim, dimana pada artikel ini diperlihatkan bahwa adanya faktor peran institusi, kelompok kepentingan dan ideologi, serta aspek teknis implementasi melalui instrument kebijakan yang menjadi faktor dalam pembentukan kebijakan perminyakan di sektor energi.

Referensi kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan yang berjudul *Climate Change Policy: Can New Actors Affect Japan's Policy-Making in The Paris Agreement Era?* ditulis oleh Yasuko Kameyama.¹⁸ Dalam artikel ini penulis memberikan penjelasan terkait tiga peristiwa yang mempengaruhi perubahan kebijakan iklim di Jepang. Ketiga peristiwa tersebut, yaitu pertama diadakannya *Conference of Parties (COP) 3* dan pembentukan Protokol Kyoto, kedua ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, dan ketiga pembentukan Paris Agreement pada tahun 2015. Penulis artikel mendapati adanya aktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan iklim di Jepang terkait pengaruh tiga peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan mencapai target iklim di Jepang memang umumnya berada ditangan pemerintah seperti perdana menteri, namun terdapat

¹⁸ Yasuko Kameyama, "Climate Change Policy: Can New Actors Affect Japan's Policy-Making in the Paris Agreement Era?", *Social Science Japan Journal* 24, No. 1, 2021

aktor lain yang ikut mempengaruhi keputusan yang ditetapkan, seperti pelaku industri bisnis, individu, dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan iklim dan lingkungan.

Artikel ini menjadi wawasan bagi peneliti bahwa dalam analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di negara Jepang dalam kebijakan iklim juga memiliki faktor selain pemerintah eksekutif, melainkan ada faktor internasional dan domestik, yaitu rezim internasional dan peristiwa ledakan pembangkit listrik. Selain itu artikel ini juga telah memasuki ranah pembahasan kebijakan iklim terkait *Net Zero Emission*.

Referensi ketiga yaitu artikel yang ditulis oleh Mikhael Jakob, Christian Flachsland, Jan Christoph Steckel, Johannes Urpelainen berjudul *Actors, objectives, context: A framework of the political economy of energy and climate policy applied to India, Indonesia, and Vietnam*.¹⁹ Penulis artikel ini memberikan gambaran bagaimana dalam merancang kebijakan yang memfasilitasi transisi menuju sistem energi rendah karbon, memerlukan analisis mendalam menggunakan kerangka ekonomi politik kerja aktor, tujuan dan konteks dalam proses generalisasi mengenai struktur ekonomi, lembaga politik, dan lingkungan politik membentuk hasil kebijakan. Dengan menggunakan tiga negara artikel ini menjabarkan aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan, pelaksanaan, dan penegakan kebijakan iklim dan energi.

Dalam artikel ini penulis menggunakan kerangka kerja ekonomi politik analisis aktor, tujuan dan konteks. Hal tersebut ditampakkan dengan memberikan

¹⁹ Michael Jakob et al., "Energy Research & Social Science Actors , Objectives , Context : A Framework of the Political Economy of Energy and Climate Policy Applied to India , Indonesia , and Vietnam," *Energy Research & Social Science* 70, no. Maret (2020): 101775, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101775>.

empat langkah dasar dalam analisis, yaitu identifikasi aktor, jabarkan tujuan para aktor, menilai konteks ekonomi dan kelembagaan, serta analisis interaksi dinamis para faktor. Artikel ini akan menjadi bahan perbandingan oleh peneliti dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor energi Indonesia.

Referensi keempat yang peneliti gunakan sebagai referensi adalah artikel tulisan Ephraim Bonah, Fahd Amjad, Muhammad Mohsin dengan judul *A bird's eye view of Ghana's renewable energy sector environment: A Multi-Criteria Decision-Making approach*.²⁰ Artikel ini membahas secara rangkap menggunakan analisis politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan terkait sektor energi terbarukan di Ghana. Analisis yang gunakan penulis dalam artikel ini menentukan peringkat berbagai faktor yang teridentifikasi berpengaruh dalam kebijakan sektor lingkungan energi terbarukan Ghana.

Dalam tulisan ini, penulis memberikan wawasan terkait bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan iklim sektor energi di Ghana. Dengan menunjukkan hasil bahwa adanya kemiripan kondisi sektor energi Ghana dengan Indonesia, dimana saling membutuhkan dana modal yang besar tapi memiliki sumber daya yang sangat potensial. Dari data tersebut penulis menjadikan artikel ini sebagai pembandingan dari analisis faktor yang mempengaruhi proses pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor energi di Indonesia.

Referensi Terakhir adalah Artikel yang ditulis oleh Michael Howlett dengan judul *'Power-sensitive design principles' for climate change adaptation policy-*

²⁰ Ephraim Bonah Agyekum et al., "A Bird's Eye View of Ghana's Renewable Energy Sector Environment: A Multi-Criteria Decision-Making Approach," *Utilities Policy* 70, no. Juni 2020 (2021): 101219, <https://doi.org/10.1016/j.jup.2021.101219>.

*making in South Asia.*²¹ Artikel ini membahas terkait efek negatif dari kekuasaan dalam pembentukan kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam konteks Kawasan Asia Selatan. Artikel ini bagaimana para aktor dapat menangani efek negatif dari kekuasaan dalam proses pembuatan kebijakan perubahan iklim.

Artikel ini menjadi referensi peneliti sebagai pembanding dalam analisis faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan pada negara di kawasan Asia lainnya. Selain itu menjadi pembanding analisis aspek yang berbeda, yaitu kekuasaan, namun bersandingan dengan aspek yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu aspek ide dalam pembuatan kebijakan.

Bahan bacaan terdahulu yang peneliti gunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran umum terkait isu kebijakan iklim yang ada di beberapa negara, yaitu Vietnam, Jepang, dan Ghana, dengan masing-masing telah dibahas dalam lima bahan bacaan yang peneliti gunakan dengan sekaligus memiliki bahasan proses pembentukan kebijakan di dalamnya. Namun dalam bahan bacaan yang peneliti gunakan sebagai studi literatur masih belum ada pembahasan spesifik terhadap analisis faktor yang mempengaruhi proses pembentukan kebijakan iklim yang terkait dengan pengurangan emisi dengan penargetan *Net Zero Emission* secara spesifik.

²¹ Sumit Vij et al., “Power-Sensitive Design Principles’ for Climate Change Adaptation Policy-Making in South Asia,” *Earth System Governance* 9, no. Juni (2021): 100109, <https://doi.org/10.1016/j.esg.2021.100109>.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Climate Foreign Policy*

Foreign Policy merupakan suatu tindakan atau keputusan berdasar visi tentang hasil yang diinginkan atau serangkaian kepentingan dalam interaksi dengan negara atau aktor lain menggunakan strategi dan ide yang menjadikan sumber daya tersedia di suatu negara dalam memandu interaksinya dengan negara lain.²² Teori kebijakan luar negeri yang peneliti akan gunakan dalam penelitian ini merupakan teori yang dijabarkan oleh Paul G. Harris dalam buku berjudul *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice*.²³ Fokus pembahasan yang dituliskan oleh Paul G. Harris dalam buku ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri iklim suatu negara.

Paul G. Harris memaparkan bahwa kebijakan luar negeri dapat dilihat dari tiga aspek. Aspek pertama, *power based* dengan fokus analisis kepada pengaruh hegemoni terhadap suatu negara dan aktor yang paling dominan dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri, dengan merujuk kepada contoh Perdana Menteri, Presiden, kelompok kepentingan, dan politisi. Pada beberapa kasus yang terjadi, Presiden dan Perdana Menteri memiliki otoritas yang lebih dominan. Kedua, *interest-based* yang berfokus pada kepentingan berbagai kelompok. Dalam aspek *interest-based*, pembentukan kebijakan luar negeri adalah hasil perundingan dan tawar menawar yang berasal dari berbagai kepentingan. Ketiga, *cognitive approach*

²²Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations," *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 06, no. 04 (2018).

²³Paul G. Harris, *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice* (Taylor & Francis, 2009).

membahas terkait pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara yang merupakan respon terhadap adanya perubahan serta informasi baru mengenai suatu hal.

Paul G. Harris menggabungkan dari ketiga aspek dengan *systemic*, *societal*, dan *state-centric theory* dalam melakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan negeri, lebih lanjut terhadap kebijakan luar negeri iklim. Pada *systemic theory* analisis berfokus pada pembahasan mengenai peran sistem internasional dalam membentuk identitas, menentukan kepentingan negara, dan bagaimana membentuk perilaku sebuah negara. Societal theory memiliki fokus analisis kepada peran aktor domestik terkait bagaimana aktor domestik mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri iklim. Terakhir State-centric theory, pada teori ini memiliki fokus analisis kepada peran negara dan lembaga domestik dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara.

Dari pemaparan ketiga aspek dan teori diatas, Paul G. Harris menuliskan teori yang direkomendasikan untuk digunakan menganalisis faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri iklim suatu negara:

Ideas-based state-centric theory

Pada pendekatan *ideas-based state-centric theory* yang dibawa oleh Paul G. Harris menawarkan analisis pada aspek ide, nilai dan diskursus dalam melihat bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan kebijakan luar negeri lingkungan suatu negara. Dengan memaparkan masing-masing aspek yang sejalan dalam *cognitive approach*, yang menekankan fokus analisis terhadap ide, nilai dan diskursus memiliki peran dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri lingkungan. Dalam konteks pembentukan kebijakan luar negeri lingkungan, masing-masing aspek mewakili poin yang nantinya akan mempengaruhi

pembentukan kebijakan luar negeri lingkungan terkait. Dengan ide mengacu pada konsep, keyakinan, dan teori yang mempengaruhi cara para pembuat kebijakan memahami isu terkait perubahan iklim dalam proses perumusan kebijakan. Ide dapat bisa berasal dari rezim internasional, komunitas ilmiah, maupun aktor non-negara yang membawakan pertimbangan dan masukan. Selanjutnya nilai mewakili para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan sebagai pedoman sekaligus pertimbangan etis atau prinsip dalam proses pembentukan kebijakan. Nilai-nilai ini dapat mencakup ruang lingkup keadilan lingkungan, tanggung jawab global, dan keberlanjutan. Terakhir, diskursus atau wacana mewakili aspek terkait debat, percakapan, dan komunikasi yang akhirnya membentuk pemahaman publik dan kebijakan terkait isu perubahan iklim, yang mana diskursus dapat berasal dari komunitas ilmiah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun komunitas publik.²⁴

Beberapa ahli berpendapat, bahwa pandangan dunia, kekayaan kausal, dan keyakinan berprinsip yang dipegang oleh para pembuat kebijakan berfungsi sebagai peta jalan, berkontribusi pada pencapaian hasil yang efisien tanpa adanya keseimbangan yang unik, serta menentukan kebijakan tanpa adanya inovasi, apabila ditanamkan pada institusi. Sayangnya dari beberapa penelitian tersebut, buku penting Goldstein dan Keohane yang memberikan bahasan terkait kekuatan tentang ekonomi, kolonialisme, terorisme, dan hak asasi manusia, namun tidak memiliki pembahasan terkait kebijakan lingkungan. Pemikiran lain juga menyelidiki peran ilmu pengetahuan dalam membentuk kebijakan luar negeri di bidang lingkungan.

²⁴ Paul G. Harris, *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice* (Taylor & Francis, 2009).

Dengan pernyataan bahwa kebijakan lingkungan hidup bergantung pada penelitian dan bukti ilmiah.²⁵

Lebih lanjut, ide dan nilai yang berkembang seiring bagaimana proses terbentuknya konstruksi sosial dunia internasional terkait isu perubahan iklim, menjadikan adanya keterkaitan kepada pendekatan konstruktivis yang juga memiliki pandangan sama. Dengan pendekatan ini melihat suatu kebijakan terbentuk bukan hanya sekadar hasil dari tekanan eksternal atau kepentingan ekonomi negara, namun juga merupakan refleksi dari ide, ideologi, dan konstruksi sosial yang berkembang. Dengan aspek ide, nilai dan diskursus yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan iklim suatu negara, pembentukan identitas negara pada akhirnya akan menjadi salah satu hasil akhir dari tujuan negara dalam pembentukan kebijakan luar negeri yang ditetapkan.

Pendekatan yang disarankan dalam teori ini yang melintasi batas antara teori dengan fokus teori analisis negara dan lembaga domestik sebagai aktor utama, menjadikan analisis tidak mengenyampingkan analisis pada masyarakat dan tetap mengakui peran negara sebagai aktor utama negara adalah dengan menyelidiki peran kelompok-kelompok masyarakat dalam membentuk nilai-nilai para pembuat kebijakan bahkan pemahaman ilmiah mengenai isu-isu lingkungan dan sumber daya.²⁶ Harris mencatat bahwa lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah menggunakan konferensi dan kegiatan lain terkait untuk menguatkan kesadaran masyarakat akan masalah lingkungan, Hal tersebut dibuktikan dengan salah satunya, LSM di Amerika Serikat memainkan peran penting dalam pertimbangan kongres

²⁵ Paul G. Harris, *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice* (Taylor & Francis, 2009).

²⁶ Paul G. Harris, *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice* (Taylor & Francis, 2009).

terkait kebijakan bank Pembangunan multilateral. Berdasarkan argument yang telah disebutkan di atas, para pembuat kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan berdiskusi dengan mendengarkan dan menanggapi ide-ide yang dikemukakan oleh para ilmuwan dan ahli, LSM, serta kelompok lain di luar negara. Tentu, yang menjadi para pembuat kebijakan yang paling dekat adalah para pejabat terpilih dan para anggota lembaga dengan sumber kebijakan tetap berasal dari gagasan-gagasan yang beredar di masyarakat dan komunitas.

Teori kebijakan luar negeri iklim yang dijabarkan oleh Paul G. Harris ini dapat membantu peneliti dalam menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor energi Indonesia dalam upaya mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) global. Lebih lanjut, penelitian ini akan menggunakan *ideas-based state-centric* theory untuk melihat pengaruh dan peran lembaga eksekutif kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu presiden dan kementerian terkait, sebagai representasi negara, beserta pengaruh ide, nilai, dan diskursus dalam pembentukan kebijakan yang didalamnya terdapat peran pihak non-governmental yang mempengaruhi pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui berbagai tekanan dan upaya yang dilakukan. Setelah analisis yang dilakukan berdasarkan teori Paul G. Harris, tulisan ini akan dirangkum sehingga akan didapatkan temuan penelitian yang akan menampakkan apa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor energi di Indonesia.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan seperangkat sistem atau cara yang disusun agar memiliki struktur yang tersusun baik untuk dapat digunakan dalam menganalisis, mengolah hingga menyimpulkan fenomena atau isu yang diangkat pada suatu penelitian.²⁷ Terkait dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana dalam metode ini pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian, sehingga penelitian ini mendapatkan hasil penelitian deskriptif.

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan fenomena dengan menjabarkan gambaran umum dari objek penelitian hingga mencapai gambaran yang lebih spesifik kepada suatu fenomena. Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif ini bertujuan agar dapat menjawab pertanyaan terkait apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Energi (NEK) sektor energi di Indonesia dalam upaya mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) global.

1.8.2 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan batasan penelitian dalam rentang waktu tahun 2016 hingga 2024. Batasan tersebut ditetapkan oleh peneliti disebabkan pada tahun 2015 merupakan tahun diresmikan dan disepakatinya *Paris*

²⁷ Umar Suryadi Bakry. 2019. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 5-6

Agreement atau Perjanjian Paris sebagai rezim internasional baru yang dipedomani para negara yang ingin mewujudkan mitigasi yang baik terhadap perubahan iklim. Setelah melalui proses perumusan, satu tahun kemudian Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris pada 2016 melalui UU nomor 16 tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2021, Indonesia meluncurkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2021. Maka dari itu peneliti menetapkan batasan penelitian dengan jangka waktu 2016 – 2024, karna penelitian ini akan membahas terkait dinamika yang terjadi dalam proses pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Indonesia disektor energi yang masih berlangsung penerapannya hingga saat ini pada tahun 2024

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun unit dan level analisis yang akan menjadi fokus dalam proses analisis permasalahan penelitian. Unit analisis adalah objek yang akan menjadi objek untuk digunakan dalam peneliti melakukan analisa terhadap objek penelitian. Sedangkan unit eksplanasi merupakan segala perilaku yang terlihat pada unit analisis. Pada penelitian ini, objek yang menjadi unit analisis oleh peneliti adalah Indonesia, sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang menjelaskan perilaku yang muncul dari unit analisis.²⁸ Selanjutnya yang menjadi unit eksplanasi adalah Kebijakan Ekonomi Karbon (NEK) di Sektor Energi Indonesia.

Sedangkan tingkat analisis adalah sebuah teori yang dapat membantu dalam penelitian untuk bisa menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Carmen

²⁸ Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi", Jakarta: LP3ES, hal 39

Gebhard memaparkan ada 4 level analisis dalam penelitian hubungan internasional, yaitu level sistem, level kelompok, dan level individual.²⁹ Tingkat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah level analisis di level negara, yaitu Indonesia. Analisis yang berada pada tingkat analisis negara ini disebabkan penelitian ini berfokus menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi proses pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor energi di Indonesia dalam upaya mencapai target *Net Zero Emission* global.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini disusun menggunakan data sekunder berupa literatur yang memiliki relevansi untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang peneliti dapatkan melalui proses studi pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, studi pustaka yang terdapat pada penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data relevan yang bersumber dari buku studi hubungan internasional, diantaranya terdapat pada buku tulisan Paul G. Harris dengan judul “Environmental Change and Foreign Policy”. Kemudian data bersumber dari jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Artikel yang termasuk di dalamnya adalah tulisan Mikhael Jakob, Christian Flachsland, Jan Christoph Steckel, dan Johannes Urpelainen “Actors, objectives, context: A framework of the political economy of energy and climate policy applied to India, Indonesia, and Vietnam”.

²⁹ Carmen Gebhard, “Levels of Analysis in International Relations,” *E-International Relations*, 27 Maret 2022, diakses 13 Mei 2024, <https://www.e-ir.info/2022/03/27/levels-of-analysis-in-international-relations/>.

Selain buku dan artikel jurnal ilmiah, dalam penelitian ini juga menggunakan sumber yang berasal dari situs resmi negara Indonesia seperti situs Portal Informasi Indonesia dan UU Republik Indonesia, yang diakses melalui jejaring <https://ppid.menlhk.go.id/> dan <https://ppid.menlhk.go.id/>, Untuk situs resmi dari UNFCCC dan Paris Agreement, diakses melalui <https://unfccc.int/process/the-convention/history-of-the-convention>. Selain sumber utama, terdapat juga sumber pendukung dalam penelitian ini seperti, portal berita nasional maupun internasional, yang kemudian akan dikumpulkan sehingga akan dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada bagian analisis data, peneliti akan menggunakan teknik analisis yang dimulai dengan melakukan pengumpulan data-data terkait topik yang diangkat dalam penelitian ini. Setelah ditemukan, data-data tersebut akan dipilah sehingga menghasilkan data yang lebih spesifik untuk dijabarkan dan dianalisis lebih dalam berdasar pada setiap bab dalam penelitian ini. Adapun data-data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah data yang memiliki kaitan dengan rezim perubahan iklim, partisipasi Indonesia dalam perjanjian iklim internasional, dinamika kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) terkhusus sektor energi, selanjutnya data yang relevan dengan *Net Zero Emission* sebagai target iklim global yang ingin dicapai oleh Indonesia.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan dan pemilahan terhadap data, maka peneliti akan melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan konsep yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya yaitu konsep *Foreign Policy* yang

dikemukakan oleh Paul G. Harris. Selanjutnya, Analisis akan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri perubahan iklim. Setelah proses analisis data yang peneliti lakukan, selanjutnya peneliti mengupayakan agar mendapatkan jawaban yang bisa menjawab pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini, peneliti memuat terkait apa saja hal yang menjadi alasan peneliti dalam melakukan penelitian dengan menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor energi di Indonesia dalam upaya mencapai target *Net Zero Emissions* global. Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab diantaranya, latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konsep, metodologi penelitian, hingga sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini.

Bab II Indonesia dan Agenda Iklim Global

Pada bab ini akan dipaparkan tentang bagaimana pembentukan UNFCCC sebagai kerangka kerja PBB yang menjadi dasar pembentukan rezim iklim global hingga terbentuknya Perjanjian Paris yang mengusung target *Net Zero Emission*. Selain itu, pada bab ini juga turut membahas mengenai proses dan dinamika Indonesia yang ikut menjadi pihak yang meratifikasi Perjanjian Paris sebagai rezim iklim global.

Bab III Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Energi Indonesia Terkait Target Net Zero Emission Global

Bab ini akan memberikan menjabarkan dinamika dalam pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Indonesia dalam upaya mencapai target *Net Zero Emission* global. Selanjutnya, pada bab ini juga akan dijelaskan juga bagaimana terkait pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor energi di Indonesia.

Bab IV Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon Indonesia di Sektor Energi

Bab ini memuat hasil analisis terkait faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor energi di Indonesia dalam upaya mencapai target *Net Zero Emission (NZE)* global menggunakan teori *foreign policy* yang dijabarkan oleh Paul G. Harris dalam melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara.

Bab V Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan, dan saran terkait keseluruhan penelitian. Isi dari kesimpulan dan saran yang dipaparkan mewakili keseluruhan analisis penelitian dan masukan kepada peneliti selanjutnya yang melakukan pembahasan dalam topik yang sama.

